

# **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017**

**UAKPA- PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

Jalan Soekarno Hatta No. 714  
Bandung - Jawa Barat 40294  
Telp. (022)7810365 Fax. (022) 7810349  
E-mail : [keu01.ptabandung@gmail.com](mailto:keu01.ptabandung@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Soekarno Hatta No. 714**

**Telp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349**

**Bandung - Jawa Barat 40293**

**e-mail : [keu01.ptabandung@gmail.com](mailto:keu01.ptabandung@gmail.com)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05.2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bandung, Januari 2018  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
Drs. H. ACH JUFRI, SH., MH  
NIP. 19680318.199303.1.002

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	15
II. Neraca .....	17
III. Laporan Operasional .....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A. Penjelasan Umum .....	23
A.1.    Dasar Hukum .....	23
A.2.    Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat .....	24
A.3.    Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	28
A.4.    Basis Akuntansi.....	28
A.5.    Dasar Pengukuran .....	29
A.6.    Kebijakan Akuntansi .....	29
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	38
B.1.    Pendapatan Negara dan Hibah .....	38
B.2.    Belanja .....	39
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	45

C.1.	Aset Lancar .....	45
C.2.	Aset Tetap .....	48
C.3.	Aset Lainnya .....	52
C.5.	Kewajiban Jangka Pendek .....	55
C.6.	Ekuitas .....	56
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	56
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak .....	56
D.2.	Beban Pegawai .....	57
D.3.	Beban Persediaan .....	57
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	58
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	59
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	59
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	60
D.8.	Beban Bantuan Sosial .....	60
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	61
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	62
D.11.	Beban Lain-lain .....	62
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	63
D.13.	Pos Luar Biasa .....	63
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	64
E.1.	Ekuitas Awal .....	64
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	64

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset .....	64
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan.....	64
E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	65
E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	65
E.3.5 Koreksi Lain-lain .....	65
E.4. Transaksi Antar Entitas .....	66
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) .....	66
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	66
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung.....	67
E.5. Ekuitas Akhir .....	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	67
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	67
F.2. Pengungkapan Lain-lain .....	68
Daftar dan Lampiran .....	70
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	71
Daftar Hibah Langsung.....	74



# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

# Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Jl. Soekarno Hatta No. 714 Bandung - Jawa Barat 40293

Telp. (022) 7810365 Fax. (022) 7810349 e-mail : [keu01.ptabandung@gmail.com](mailto:keu01.ptabandung@gmail.com)

---

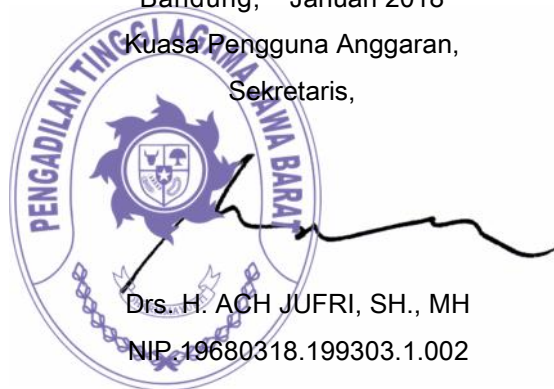
## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung, Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. The stamp contains the text 'PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. ACH JUFRI, SH., MH  
NIP. 19680318.199303.1.002

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 2 TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 162.459.608,- atau mencapai 126,19, persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 128.743.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester 2 TA 2017 adalah sebesar Rp. 24.562.982.118,- atau mencapai 93,05 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 26.396.625.000,-.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 78.225.949.879,-, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 58.907.433,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 78.165.304.317,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,-; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 1.738.129,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 34.561.870,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 78.191.388.009,-.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 162.459.440,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 24.896.766.704,-, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 24.734.307.264,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing defisit sebesar Rp. 212.965,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit -LO sebesar Rp. 24.734.520.229,-.

#### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp. 18.396.576.886,-, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 24.734.520.229,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 60.068.056.742,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 24.461.274.610,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp. 78.191.388.009,-.

#### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya

kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

# *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

## PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	Tahun 2017			Tahun 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	128.743.000,-	162.459.608,-	126,19	58.094.070,-
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>128.743.000,-</b>	<b>162.459.608,-</b>	<b>126,19</b>	<b>58.094.070,-</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	24.116.247.000,-	22.286.478.826,-	92,41	19.506.707.723,-
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.101.878.000,-	2.101.592.392,-	99,99	1.789.388.005,-
3.	Belanja Modal	B.2.3.	178.500.000,-	174.910.900,-	97,99	73.755.000,-
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>26.396.625.000,-</b>	<b>24.562.982.118,-</b>	<b>93,05</b>	<b>21.369.850.728</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Cat.	Tahun 2017	Tahun 2016
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0,-	0,-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	25.235.400,-	51.191.020,-
Persediaan	C.1. 3.	33.672.033,-	17.060.330,-
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 4.	0	0,-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>58.907.483,-</b>	<b>68.251.350,-</b>
<b>Aset Tetap</b>	<b>C.2</b>		
Tanah	C.2. 1.	62.330.150.000,-	9.250.500.000,-
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	6.744.028.487,-	6.742.893.487,-
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	15.513.169.000,-	10.711.503.194,-
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	92.323.540,-	92.323.540,-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(6.514.366.710,-)	(8.469.888.672,-)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>78.165.304.317,-</b>	<b>18.327.331.549,-</b>
<b>Aset Lainnya</b>	<b>C.4</b>		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	19.932.000,-	19.932.000,-
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	444.566.000,-	212.106.000,-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	C.4. 3.	(462.759.871,-)	(230.197.629,-)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.738.129,-</b>	<b>1.840.371,-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>78.225.949.879,-</b>	<b>18.397.423.270,-</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>C.5</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	34.561.870,-	846.384,-
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	0,-	0,-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>0,-</b>	<b>0,-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>34.561.870,-</b>	<b>846.384,-</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas</b>	<b>C.6</b>		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>78.191.388.009,-</b>	<b>18.396.576.886,-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>78.225.949.879,-</b>	<b>18.397.423.270,-</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Cat.	Tahun 2017	Tahun 2016
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	162.459.440,-	50.130.118,-
<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	22.321.280.135,-	19,481,452,587,-
Beban Persediaan	D. 3	54,419,122,-	61,208.539,-
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1,077,799,169,-	937,432,301,-
Beban Pemeliharaan	D. 5	644,291,815,-	389.535.452,-
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	307,864,700,-	413,636,309,-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0,-	0,-
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0,-	0,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	494,645,763,-	463,700,272,-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0,-	(36,250)
Beban Lain-lain	D. 11	0,-	0,-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>24.896.766.704,-</b>	<b>21,746,929,210,-</b>
<b>Defisit dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(24,739.307.264,-)</b>	<b>(21,696,799,092,-)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	<b>D. 12</b>		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0,-	0,-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0,-	0,-
Defisit Selisih Kurs		0,-	0,-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		683.221,-	0,-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		896.186,-	0,-
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(212,965,-)</b>	<b>(151,009,-)</b>
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(24,734.520.224,-)</b>	<b>(21,696,950,101,-)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>D. 13</b>		
Pendapatan PNBP		0,-	0,-
Beban Perjalanan Dinas		0,-	0,-
Beban Persediaan		0,-	0,-
<b>Surplus/Defisit Laporan Operasional</b>		<b>(24.734.520.224,-)</b>	<b>(21,696,950,101,-)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

### PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Cat.	Tahun 2017	Tahun 2016
Ekuitas Awal	E. 1	18.396.576.886,-	17.500.153.001,-
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(24.754.520.224,-)	(21.696,950,101,-)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3	60,068,056,742,-	(19.473.261,-)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4	0,-	0,-
Koreksi Nilai Persediaan	E. 5	0,-	0,-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 6	56,018,170,289,-	0,-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 7	4,078,683,000,-	(19.473.261,-)
Koreksi Lain-lain	E. 8	(28,796,547,-)	0,-
Jumlah		0,-	(19.473.261,-)
Transaksi Antar Entitas	E. 9	24,461,274,610,-	22.612.847.247,-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 10	59.794.811.123,-	896,423,885,-
Ekuitas Akhir		78,191.388.009,-	18,396,576,886,-

\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

## *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*



## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Dalam rangka mewujudkan kebijakan umum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan tepat waktu dan sasaran, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut.

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah :

#### **TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT YANG AGUNG”**

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Sebagai Pengadilan Tinggi Agama Yang Agung” adalah sebagai berikut :

##### 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan pelayanan berbasis teknologi, penataan ulang manajemen perkara, dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

##### 2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

### 3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Bandung memiliki lebih dari 61% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan rentang kendali wilayah yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara, sidang keliling/zitting plaats dan pos layanan hukum (posyankum). Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementerian Agama cq. Kantor Urusan Agama setempat melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berusaha mengidentifikasi apa yang akan

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Sebagai Pengadilan Agama Yang Agung” maka Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat menetapkan 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

---

Laporan Keuangan Semester 2 TA 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

---

Pegadilan Tinggi Agama Jawa Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 2 TA 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut:

#### (1.) Pendapatan LRA

---

- ) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- ) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- ) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### (2.) Pendapatan LO

---

- ) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- ) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- ) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah



dikompensasikan dengan pengeluaran).

) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

---

) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

---

) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

### a. Aset Lancar

---

- ) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- ) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- ) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- ) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- ) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- ) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- ) Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- ) Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- ) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah

raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- ) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

- ) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- ) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- ) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- ) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- ) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- ) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- ) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. **Aset Lainnya**

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## (6.) Kewajiban

---

- ) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- ) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- ) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## (7.) Ekuitas

---

- ) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi  
Pendapatan  
Negara dan  
Hibah : Rp.  
162.459.608,-*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 162.459.608,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 128.743.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	71.550.000,-	90.100.000,-	125.92
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	100,-	168,-	16.80
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	57.192.000,-	72.359.608,-	54.8
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>128.743.000,-</b>	<b>162.459.608,-</b>	<b>197.5</b>

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester II TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 104.365.538,- atau sebesar 179.6% dibandingkan Semester II TA 2016.

Hal ini disebabkan karena:

- Adanya pemanfaatan Barang Milik Negara berupa sewa gedung wisma Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang berdasarkan surat persetujuan sewa dari KPKNL Bandung nomor :S-60/MK.06/WKN.08/KNL.01/2016 tanggal 24 Juni 2016, dengan tarif per 6 jam sebesar Rp. 2.650.000,- dan banyaknya yang menyewa aula wisma tersebut menjadikan penerimaan PNBP tahun 2017 meningkat dengan pesat.



Perbandingan realisasi PNBP Semester II TA 2017 dan Semester II TA 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017 dan 1 Desember TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	90.100.000,-	0,-	90.100.000,-	100
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	72.359.440,-	50.130.118,-	22.229.322,-	44,34
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	168,-	713.952,-	(713.784)	(99,97)
4.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan TGR	0,-	7.250.000,-	(7.250.000,-)	(100,00)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>162.459.608,-</b>	<b>58.094.070,-</b>	<b>104.365.538</b>	<b>179,65</b>

## B.2. Belanja

Realisasi Belanja  
Negara:  
Rp.24.562.982.118

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 24.562.982.118,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 93.06% dari anggaran senilai Rp. 26.396.625.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester 2 TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

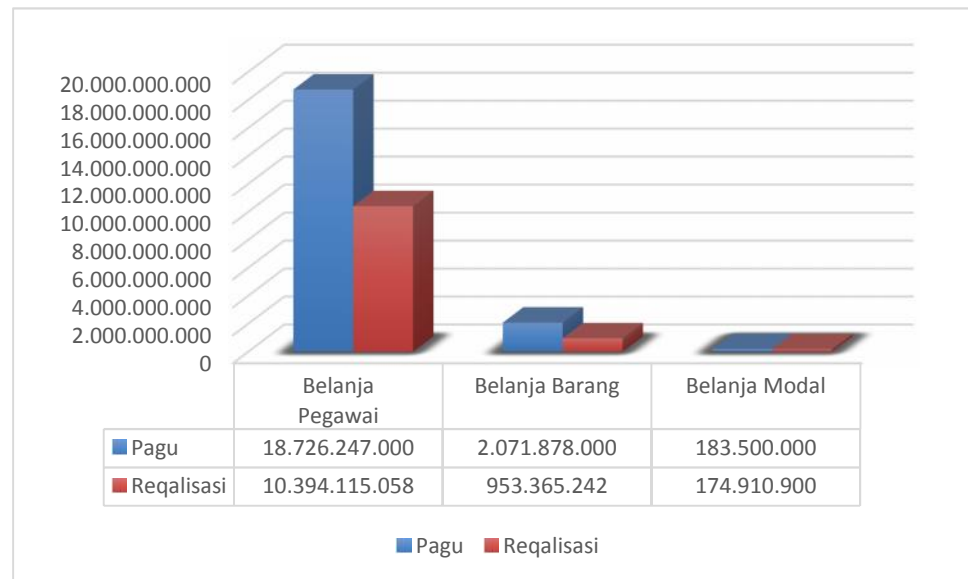
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	24.116.247.000,-	22.286.478.826	92.41
Belanja Barang	2.101.878.000,-	2.101.592.392,-	99.99
Belanja Modal	178.500.000,-	174.910.900,-	97.99
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>26.396.625.000,-</b>	<b>24.563.611.630</b>	<b>93.05</b>
Pengembalian Belanja	0,-	(629.512,-)	

Total Belanja Netto	20.981.625.000,-	24.562.982.118,-	93.06
---------------------	------------------	------------------	-------

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017**  
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami Kenaikan sebesar Rp. 3.193.131.390,- atau sebesar 14.94 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Pada tahun 2017 Ini jumlah Hakim yang mutasi masuk lebih besar dari tahun 2016, ada beberapa Hakim dan Panitera Pengganti yang memasuki Masa pensiun ;
2. Terdapat penambahan Anggaran pada akun belanja 521119 dari Mahkamah Agung sebesar Rp.25.000.000,-

dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	22.286.478.826,-	19.506.707.723,-	2.779.771.103	14,25
Belanja Barang	2.101.592.392,-	1.789.388.005,-	312.204.387	17,44
Belanja Modal	174.910.900,-	73.755.000,-	101.155.900	137,15
<b>Total Belanja</b>	<b>24.562.982.118,-</b>	<b>21.369.850.728,-</b>	<b>(21.369.850.728,-)</b>	<b>169</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja  
Pegawai : Rp  
22.286.478.826,-

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 22.286.478.826,- dan Rp. 19.506.707.723,-.

Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2017 mengalami Kenaikan sebesar 14.25 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2016. Hal ini disebabkan adanya mutasi Hakim yang pindah ke PTA Jabar dan ada beberapa Hakim dan Panitera Pengganti yang memasuki masa pensiun,

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
<b>Beban Gaji Pokok PNS</b>	4.370.999.100	4.162.436.900	208.562.200	5,01
<b>Beban Pembulatan Gaji PNS</b>	52.584	49.287	3.297	6,68
<b>Beban Tunj. Suami/Istri PNS</b>	346.235.570	336.557.250	9.678.320	2,87
<b>Beban Tunj. Anak PNS</b>	62.613.338	65.387.790	(2.774.452)	-4,24
<b>Beban Tunj. Struktural PNS</b>	87.165.000	85.520.000	1.645.000	1,92
<b>Beban Tunj. Fungsional PNS</b>	14.072.150.000	11.824.900.000	2.247.250.000	19,0
<b>Beban Tunj. PPh PNS</b>	2.637.040.106	2.374.207.283	262.832.823	11,0
<b>Beban Tunj. Beras PNS</b>	158.744.640	158.527.380	217.260	0,13
<b>Beban Uang Makan PNS</b>	517.723.000	464.472.000	53.251.000	11,4

<b>Beban Tunjangan Umum PNS</b>				
	34.385.000	35.580.000	(1.195.000)	-3,35
<b>Beban Uang Lembur</b>				
	0,-	0,-	0,-	0,00
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>22.287.108.338</b>	<b>19.507.637.890</b>	<b>2.779.470.448</b>	<b>14,25</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>(629.512)</b>	<b>(930.167,-)</b>	<b>(300.655)</b>	<b>(81,54)</b>
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>22.286.478.826,-</b>	<b>19.506.707.723,-</b>	<b>2.779.771.103</b>	<b>14,25</b>

## B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang :  
Rp.2.101.592.392,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.101.592.392,- dan Rp. 1.789.388.005,-.

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 17.44 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Dibayarnya Tunjangan THR kepada Tenaga Kontrak sementara tahun 2016 tidak di bayarkan;
2. Meningkatnya kegiatan operasional dan nonperasional kantor sehingga meningkatkan realisasi.
3. Adanya penambahan anggaran dari Mahkamah Agung RI untuk akun 521119 sebesar Rp. 25.000.000.-

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA	Semester II TA 2016	Perubahan	
	2017	Realisasi	Rp	%
	Realisasi			
<b>Belanja Barang Operasional</b>	<b>800.681.970,-</b>	<b>645.722.799,-</b>	<b>154.959.171</b>	<b>23,9</b>

Belanja Barang Non Operasional	110.288.000,-	118.606.060,-	(8.318.060)	(7,01)
Belanja Barang Persediaan	93.237.141,-	81.610.000,-	11.627.141	14,25
Belanja Jasa	170.286.949,-	173.103.422,-	(2.816.473)	(1,62)
Belanja Pemeliharaan	622.298.632,-	356.709.395,-	265.589.237	74,45
Belanja Perjalanan Dinas	304.799.700,-	413.636.309,-	(108.836.609)	(26,3)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>953.365.242,-</b>	<b>818.444.165,-</b>	<b>134.921.077,-</b>	<b>17,45</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.101.592.392,-</b>	<b>1.789.387.985,-</b>	<b>312.204.407</b>	<b>16,49</b>

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja  
Modal :Rp.  
174.910.900,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 30 Desember TA 2017 dan Semester II TA 2016 adalah sebesar Rp. 174.910.900,- dan Rp. 73.755.000,-.

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 137,15 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2016. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya kenaikan Pagu Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp. 109.500.000,- atau 147,97 % dibandingkan TA 2016.
2. Adanya belanja monitoring atau belanja modal khusus untuk penunjang SIPP sebesar Rp. 64.500.000,- sementara tahun 2016 tidak ada.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	174.910.900,-	73.755.000,-	101.155.900	137,15

Belanja Modal Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,00
Total Belanja Brutto	174.910.900,-	73.755.000,-	101.155.900	137,15
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	174.910.900,-	73.755.000,-	101.155.900	137,15

### B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk Semester II TA 2017 memiliki Pagu Rp. 178.500.000,-. Sementara Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2017 dan Semester I TA 2016 adalah sebesar Rp. 174.910.900,- dan Rp. 73.755.000,-. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 137,15 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2016. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan atas belanja modal peralatan dan mesin Alat Pengolah Data dan Komunikasi baik Pendukung SIPP dan pendukung kesekretariatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan pada Semester 2 TA 2017.

#### Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester 2 TA	Semester I TA 2016	Perubahan	
	2017		Rp	%
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	43.526.900,-	73.755.000,-	(30.228.100,-)	(40,98)
Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	63.085.000,-	0,-	63.085.000,-	100,00
Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP	68.299.000,-	0,-	68.299.000,-	100,00
Total Belanja Brutto	174.910.900,-	73.755.000,-	101.155.900,-	137,15
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	174.910.900,-	73.755.000,-	101.155.900	137,15

### B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk Semester 2 TA

2017 memiliki Pagu Rp. 5.000.000,-. Sementara tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya selama Semester 2 TA 2017 karena belum menemukan antivirus yang sesuai dengan pagu dengan masa aktivasi lebih dari satu tahun dan TA 2016 tidak ada pagu untuk Belanja modal Lainnya, sehingga belanja anti virus di revisi ke akun 521119.

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

### C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp  
33.672.033,-*

Nilai Aset Lancar per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.907.433,- dan Rp. 68.251.350,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 disajikan pada tabel di bawah:

**Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semestre I TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	0,-
Belanja Dibayar di Muka	25.235.600,-	51.191.020,-
Persediaan	33.672.033,-	17.060.330,-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>58.907.433,-</b>	<b>68.251.350,-</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari

Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember TA. 2016
1.	Uang Tunai	0,-	0,-
2.	Kuitansi UP yang belum di SPM-GU-kan	0,-	0,-
3.	Bank BRI acc.0286.01.000380.303	0	0,-
	<b>Jumlah</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp.  
25.235.400,-*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.235.400,- dan Rp. 51.191.020,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2017	31 Desember TA 2016
1.	Belanja dibayar di muka	25.235.400,-	51.191.020,-
	<b>Jumlah</b>	<b>25.235.400,-</b>	<b>51.191.020,-</b>

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp.  
33.672.033,-*

Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 33.672.033,- dan Rp. 17.060.330,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam



bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik (Stock Opname) Persediaan Nomor: W10-A/PL03/VI/2017 tanggal : Juni 2017, kondisi barang persediaan tersebut dalam keadaan baik.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

**Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	26.072.776,-	12.477.565,-
2	Amunisi	0,-	0,-
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	7.599.257,-	4.612.765,-
4	Suku Cadang	0,-	0,-
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0,-	0,-
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,-	0,-
7	Bahan Baku	0,-	0,-
8	Barang dalam Proses	0,-	0,-
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0,-	0,-
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0,-	0,-
11	Persediaan lainnya	0,-	0,-
<b>Total</b>		<b>33.672.033,-</b>	<b>17.060.330,-</b>

**C.1.4. Persediaan yang Belum Diregister**

*Persediaan yang belum diregister: Rp. 0,-*

Persediaan yang Belum Diregister per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Persediaan yang Belum Diregister ini adalah pembelian persediaan yang sudah di catat pada aplikasi persediaan dan simak karena tanggal transaksi masuk pada semester satu akan tetapi pada saat akhir semester 1 belum dilakukan GUP penggantian uang

persediaan ke KPPN sehingga pada neraca muncul persediaan yang belum di register.

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap :*  
Rp.  
78.165.304.317  
,-

Nilai Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 tersaji sebesar Rp. 78.165.304.317,- dan Rp. 18.327.331.549,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah sebagai berikut :

### Rincian Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Semester 2 TA 2017	31 Desember TA 2016	Perubahan
1	Tanah	62.330.150.000,-	9.250.500.000,-	0,-
2	Peralatan dan Mesin	6.744.028.487,-	6.742.893.487,-	174.910.900,-
3	Gedung dan Bangunan	15.513.169.000,-	10.711.503.194,-	0,-
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0,-	0,-	0,-
5	Aset Tetap Lainnya	92.323.540,-	92.323.540,-	0,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	84.679.671.027,-	26.797.220.221,-	57.882.450.806,-
	Akumulasi Penyusutan	(6.514.366.710,-)	(8.469.888.672,-)	1.955.521.962
	Nilai Buku Aset Tetap	78.165.304.317,-	18.327.331.549,-	59.837.972.768

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp.*  
62.330.150.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 62.330.150.000,- dan Rp. 9.250.500.000,-.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

#### Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	298 M <sup>2</sup>		Yayasan Ar Rohmah	Rumah Dinas	894.000.000
2.	Mes/Wisma/Asrama Baleendah	3.500 M <sup>2</sup>		Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Wisma	16.344.108.000
3.	Tanah Kantor	1.110 M <sup>2</sup>		Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Gedung Arsip	18.468.692.000
4.	Tanah Kantor	1.950 M <sup>2</sup>		Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Kantor	26.623.350.000
<b>Jumlah</b>						<b>62.330.150.000</b>

Tidak ada Mutasi Tambah atau Mutasi Kurang yang menyebabkan perubahan nilai Tanah selama Semester II TA 2017.

Saldo per 31 Desember 2016	9.250.500.000
<b>Mutasi Tambah</b>	
- Revaluasi	53.097.650.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
-	0
Saldo per 31 Desember 2017	62.330.150.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	62.330.150.000

## C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin : Rp 6.744.028.487,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.744.028.487,- dan Rp. 6.742.893.487,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	6.742.893.487,-
<b>Mutasi Tambah</b>	
101 – Pembelian	174.910.900,-
102 – Transfer Masuk	63.854.100,-
107 – Reklasifikasi Masuk	0,-
<b>Mutasi Kurang</b>	
401 – Penghentian Aset dari Penggunaan	79.407.000,-
302 – Transfer Keluar	5.170.000,-
188 – Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	153.053.000,-
Saldo per 31 Desember 2017	6.744.028.487,-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(6.309.941.332,-)

Nilai Buku 31 Desember 2017

434.087.155,-

Terjadi kenaikan senilai Rp. 1.135.000.- atau 0.01%. Adapun Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin berupa:

1. Pembelian

b. Alat Kantor	88.825.000,-
c. Alat Studio	8.600.000,-
d. Komputer	77.485.900,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
15.513.169.000,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 15.513.169.000,- dan Rp. 10.711.503.194,-.

Terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang yang menyebabkan perubahan nilai Gedung dan Bangunan selama Semester 2 TA 2017:

Saldo per 31 Desember 2016	10.711.503.194
<b>Mutasi Tambah</b>	
- Koreksi Nilai Tim Penerbitan Aset	2.967.863.289
- Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	3.289.659.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
- Koreksi semu hasil penilaian kembali	2.067.641.483
Saldo per 31 Desember 2017	15.513.169.000,-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(204.425.378,-)
Nilai Buku 31 Desember 2017	15.308.743.622,-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp  
0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	0
Mutasi Tambah	
-	0
Mutasi Kurang	
-	0
Saldo per 31 Desember 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya:  
Rp.92.323.540,-*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 92.323.540,- dan Rp. 92.323.540,-.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	92.323.540,-
Mutasi Tambah	
-	0,-
Mutasi Kurang	
-	0,-
Saldo per 31 Desember 2017	92.323.540,-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0,-
Nilai Buku 31 Desember 2017	92.323.540,-

Tidak terdapat Mutasi aset tetap lainnya selama Semester 2 TA 2017.

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni TA 2017 dan 31 Desember TA 2016

masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
(6.514.366.710,-)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing Rp. (6.514.366.710,-) dan Rp. (8.469.888.672,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.744.028.487,-	(6.309.941.332,-)	434.087.155,-
2	Gedung dan Bangunan	15.513.169.000,-	(204.425.378,-)	15.308.743.622,-
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0,-	0,-	0,-
4	Aset Tetap Lainnya	92.323.540,-	0,-	92.323.540,-
<b>Jumlah</b>		<b>22.349.521.027,-</b>	<b>(6.514.366.710,-)</b>	<b>15.835.154.317,-</b>

### C.3. Aset Lainnya

*Aset Lainnya:  
Rp 1.738.129,-*

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.738.129,- dan Rp. 1.840.371,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)			
No.	Uraian	Semester II TA 2017	31 Desember TA 2016
1	Aset tak Berwujud	19.932.000,-	19.932.000,-
2	Aset Lain-lain	444.566.000,-	212.106.000,-
	Nilai perolehan Aset Lainnya	464.498.000,-	232.038.000,-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(462.759.871,-)	(230.197.629,-)
	Nilai buku Aset Lainnya	1.739.129,-	1.840.371,-

#### C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :  
Rp.19.932.000,-*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 19.932.000,- dan Rp. 19.932.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	19.932.000,-
Mutasi Tambah	
-	0,-
Mutasi Kurang	
-	0,-
Saldo per 31 Desember 2017	19.932.000,-
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2017	19.932.000,-
Nilai Buku 31 Desember 2017	0,-

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi masuk atau keluar untuk aset tidak berwujud selama Semester 2 TA 2017. Pada Semester 2 TA 2017 telah dilakukan Amortisasi untuk Aset Tak Berwujud tersebut.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset tak Berwujud  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Software Komputer	19.932.000
	Jumlah Total	19.932.000

#### C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :  
Rp.  
444.566.000,-

Saldo aset lain-lain per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 444.566.000,- dan Rp. 212.106.000,-. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	212.106.000,-
Mutasi Tambah	
- Reflasifikasi dari ast ke aset lainnya	232.460.000,-
Mutasi Kurang	
-	0,-
Saldo per 31 Desember 2017	444.566.000,-
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2017	(442.827.871),-
Nilai Buku 31 Desember 2017	1.738.129,-

#### C.4.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya:  
Rp.  
(462.759.871,-)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah masing-masing Rp. (462.759.871,-) dan Rp. (230.197.629,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :



Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Software	19.932.000,-	(19.932.000,-)	0,-
2	Aset Lain-Lain	444.566.000,-	(442.827.871,-)	1.738.129,-
	Jumlah	464.498.000	(462.759.871)	1.738.129

## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek :  
Rp. 37.537.870,-*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 34.561.870,- dan Rp. 846.384,-. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester 2 TA 2017	31 Desember TA 2016
Utang Kepada Pihak Ketiga	34.561.870,-	846.384,-
Uang Muka dari KPPN	0,-	0,-
Jumlah	34.561.870,-	846.384,-

### C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak Ketiga:  
Rp. 34.561.870,-*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 34.561.870,- dan Rp. 846.384,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

### C.5.2. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN:  
Rp.0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 masing-

masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Cadangan  
Piutang:*  
Rp.  
78.191.388.009,-

Ekuitas per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 78.191.388.009,- dan Rp. 18.396.576.886,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP: Rp.*  
162.459.440,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 162.459.440,- dan Rp. 50.130.118,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:

**Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2017 dan Semester I TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	NAIK/(TURUN)	%
1.	PNBP Lainnya	162.459.440,-	50.130.118,-	112.329.322,-	224.075
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>162.459.440,-</b>	<b>50.130.118,-</b>	<b>112.329.322,-</b>	<b>224.075</b>

Pendapatan PNBP Lainnya berasal dari :

1. Penerimaan kembali Persekot Gaji Pegawai.
2. Penerimaan sewa Aula Wisma Bale Endah.

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai*  
: Rp  
22.321.280.135,  
-

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 22.321.280.135,- dan Rp. 19.481.452.587,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	4.416.814.340,-	4.140.193.490,-	276.620.850	6.6
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.636,-	49.070,-	3.733	7.6
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	350.834.254,-	333.763.169,-	17.071.085	5.1
Beban Tunj. Anak PNS	63.709.205,-	64.540.362,-	(831.157)	(1.2)
Beban Tunj. Struktural PNS	87.165.000,-	85.520.000,-	1.645.000	1.9
Beban Tunj. Fungsional PNS	14.078.750.000,-	11.824.900.000,-	2.254.780.000	19
Beban Tunj. PPh PNS	2.638.866.860,-	2.374.207.283,-	264.659.577	11.14
Beban Tunj. Beras PNS	158.744.640,-	158.527.380,-	217.260	0.13
Beban Uang Makan PNS	516.635.600,-	465.102.000,-	51.533.600	11.08
Beban Tunjangan Umum PNS	34.385.000,-	35.580.000,-	(1.195.000)	(3.35)
Beban Uang Lembur	0,-	0,-	0,-	0,00
<b>Total Beban Pegawai</b>	<b>22.321.280.135,-</b>	<b>19.481.452.587</b>	<b>2.864.504.948</b>	<b>14.70</b>

## D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan: Rp.*  
54.419.122,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.419.122,- dan Rp. 61.208.539,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	54.419.122,-	61.038.339,-	(6.619.217,-)	(10,84)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,-	0,-	0,-	0,00
Beban Persediaan Bahan Baku	0,-	170.200,-	(170.200,-)	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,00
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>54.419.122,-</b>	<b>61.208.539,-</b>	<b>(6.789.417,-)</b>	<b>(25,06)</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa : Rp.  
1.077.330.169,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.077.330.169,- dan Rp. 937.432.301,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	684.942.462	571.538.439	(6,6)	
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	10.511.276	12.190.660		
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	51.600.000	45.200.000		
Beban Barang Operasional Lainnya	54.690.000	16.793.700		
Beban Bahan	98.288.000	118.606.060		
Beban Honor Output Kegiatan	12.000.000	0,-		
Beban Langganan Listrik	148.400.151	152.385.525,-		

Beban Langganan Telepon	13.255.780	17.568.317		
Beban Langganan Air	4.111.500	3.149.600		
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>1.077.330.169,-</b>	<b>937.432.301,-</b>	<b>101.425.832,-</b>	<b>26,13</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:*  
Rp.  
644.291.815,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 644.291.815,- dan Rp. 289.705.652,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	332.567.015	119.579.935	212.987.080	178,1127
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	289.731.617	237.129.460	52.602.157	22,18289
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21.993.183	1.360.341	20.632.842	1516,74
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>644.291.815</b>	<b>389.705.652</b>	<b>265.589.237</b>	<b>74,45535</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas :* Rp.  
304.799.700,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 304.799.700,- dan Rp. 413.636.309,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik (Turun)	%
<b>Beban Perjalanan Biasa</b>	<b>281.451.309</b>	<b>276.614.700</b>	<b>4.836.609</b>	<b>1,7485</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas dalam Kota</b>	<b>27.000.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>18.550.000</b>	<b>219,5266</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>	<b>105.185.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>82.385.000</b>	<b>361,3377</b>
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>304.799.700</b>	<b>413.636.309</b>	<b>105.771.609</b>	<b>34,35</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik (Turun)	%
<b>Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp. 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial  
per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp.494.645.763,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.494.645.763,- dan Rp.463.700.272,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	189.140.081,-	250.975.565,-	(61.835.484)	(24.6)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	305.403.440,-	212.622.565,-	92.780.875	43.6
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,-	0,-	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah	102.242,-	102.142,-	100	0,09
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>494.645.763</b>	<b>463.700.272</b>	<b>30.945.491</b>	<b>6.67</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0,-	0,-	0,-	0,00

Beban Penyusutan Aset lain-lain	0,-	0,-	0,-	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>494.645.736,-</b>	<b>463.700.272</b>	<b>30.945.491</b>	<b>6.67</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0,-*

Beban Penyisihan PiutangTakTertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. (36.250),-. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Semester 2 TA 2017	Semester I TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	(36.250)	(36.250)	(100)
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>(36.250)</b>	<b>(36.250)</b>	<b>(100)</b>

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain : Rp. 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :



Rincian Beban Lain-lain  
per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional : Rp. (212.965),-*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan

Non Operasional Semester I tahun 2017 dan Semester I tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester II TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	168,-	127,-	41	32.28
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	683.053,-	298.283,-	384.770	128.99
Beban Peyesuaian Nilai Persediaan	(896.186,-)	(281.665,-)	(614.521),-	218
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>(212.965),-</b>	<b>151.009</b>	<b>(229.710)</b>	<b>(137.81)</b>

## D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp. 0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa  
per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember TA 2016  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Semester II TA 2017	Semester I TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0

Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :*  
*Rp.*  
*18.396.576.886,*  
*-* Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.396.576.886,- dan Rp. 17.500.153.001,-.

### E.2. Surplus (defisit) LO

*Defisit LO : Rp.*  
*(24.734.520.629*  
*,-)* Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. (24.734.520.629),- dan Rp. (21.696.950.101),-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara defisit kegiatan operasional, surplus kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset : Rp. 0* Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan : Rp.*  
*0* Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Koreksi Nilai Persediaan

per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap : Rp.  
56.018.170.289*

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.018.170.289 dan Rp. 0.

### E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi : Rp.  
4.078.683.000,-*

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.078.683.000,- dan Rp. (19.473.261,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi  
per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	718.059.000,-
Bangunan Gedung pertemuan permanen	2.571.600.000,-
Asrama Permanen	789.024.000,-
<b>Total Koreksi</b>	<b>4.078.683.000,-</b>

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

*Koreksi Lain-  
lain: Rp.  
(28.796.547)*

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar ( Rp. 28.796.547) dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-lain  
per 31 Desember TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	(2.796.547)
<b>Jumlah</b>	<b>(2.796.547)</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas: Rp. 24.461.274.610,-*

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. ( 24.461.274.610) ,- dan Rp. 22.612.847.247,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	24.562.952.118
Ditagihkan ke Entitas Lain	(162.459.608-)
Transfer Masuk	63.584.100,-
Transfer Keluar	(3.102.000)-
Pengesahan Hibah Langsung	0,-
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0,-
<b>Jumlah</b>	<b>24.461.274.610,-</b>

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp. 58.0984.070,- sedangkan DKEL sebesar Rp. (21.369.850.728,-)

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke

entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 63.854.100 dan Rp. 33.382.000,-. Sedangkan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 30 Juni 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp. 3.102.000) dan Rp. 68.894.625,-.

### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Selama Semester 2 TA 2017 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tidak menerima Hibah atau mengeluarkan Hibah ke Entitas Lain sehingga nilai Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebesar Rp. 0, dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung juga bernilai Rp. 0.

### **E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 78.141.288.009,- dan Rp. 18.396.576.886,-.

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

## F.2. Pengungkapan Lain-lain

### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Sampai dengan 31 Desember 2017 tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK yang dapat dijadikan Catatan Tambahan dalam Laporan Keuangan ini.

### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Terdapat Belanja Akrual pada Semester II tahun 2018 diantaranya :

1. Belanja pegawai untuk 1 orang pegawai dikarenakan SK KNP terlambat terbit.
2. Belanja Barang berupa langganan telpon bulan Desember 2017
3. Belanja Barang berupa langganan Listrik bulan Desember 2017
4. Belanja Barang berupa langganan Internet bulan Desember 2017
5. Belanja Berang berupa langganan Air PDAM bulan Desember 2017
6. Belanja Barang berupa perjalanan dinas

### F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah:

1. BRI KC Dewi Sartika Bandung A/C 0286.01.000380.30.3 a.n. BPg 095PTA Bandung01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-.
2. BRI KC Dewi Sartika Bandung A/C 0286.01.000533.30.4 a.n. BPg 095PTA Bandung04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,-.
3. BRI KC Dewi Sartika Bandung A/C 0286.01.001025.30.4 a.n. RPL 095PTABandung Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,-.

#### F.2.4. Revisi DIPA

- revisi ke 1 : Penambahan Belanja Barang Operasional lainnya ( 521119 ) sebesar
- revisi ke 2 : Penambahan THR Honorer (521111)
- revisi ke 3 : Penambahan belanja pegawai ( 511111, 511121 dan 511124)
- revisi ke 4 : perubahan harga satuan pada belanja barang( 521119 )

#### F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Adanya salah perhitungan pada akun 423951 semula 82 menjadi 123 dan akun 511119 semula 123 menjadi 82. Maka dilakukan ralat SPM tanggal 25 September 2017.

#### F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 365/PA/SK/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan lainnya di seluruh Indonesia, dan nomor W10-A/0478/KP.04.6/II/2016 tanggal Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan nomor W10-A7/026/KP.04.6/II/2016 tanggal Januari 2017 tentang Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan petugas pengelola administrasi belanja pegawai dan staf pengelola keuangan pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat adalah sebagai berikut :

) Kuasa Pengguna Anggaran	: Drs. H. Ach Jufri, SH., MH
) Pejabat Pembuat Komitmen	: Rustandi, S. Ag
) Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Syarif Bastaman
) Bendahara Pengeluaran	: Inda Mulyani, SIP
) Bendahara Penerima	: Utami Nurwulan
) Staf Pengelola/PPABP	: Chandra Dini, SE

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*



*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

**Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat**  
**Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017	s.d31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
<b>A. Tanah</b>							
1.	Tanah Rumah Dinas dan Mes/Wisma	-	2.390.250.000	-	-	-	2.390.250.000
2.	Tanah Bangunan Tempat Kerja		6.860.250.000	-	-	-	6.860.250.000
	<b>Jumlah</b>		<b>9.250.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.250.500.000</b>
<b>B. Peralatan dan Mesin</b>							
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor		1.772.466.845	1.772.466.845	-	1.772.466.845	-
2.	Alat Bengkel		3.795.000	3.795.000	-	3.795.000	-
3.	Alat Kantor		1.249.088.691	1.101.457.191	20.369.000	1.121.826.191	127.262.500
4.	Alat Rumah Tangga		1.687.840.065	1.573.593.011	16.786.214	1.590.379.225	97.460.840
5.	Alat Studio		220.869.075	219.196.200	472.875	219.669.075	1.200.000
6.	Alat Komunikasi		64.560.000	55.960.000	860.000	56.820.000	7.740.000
7.	Alat Laboratorium Elektronik		10.843.050	735.778	374.343	1.110.121	9.732.929
8.	Komputer Unit		1.413.828.336	1.220.146.943	40.771.585	1.260.918.528	152.909.808
9.	Peralatan Komputer		491.132.325	404.597.283	17.677.328	422.274.611	68.857.714
10.	Unit Peralatan Proses		2.035.000	2.035.000	-	2.035.000	-
11.	Peralatan Olah Raga		1.346.000	1.346.000	-	1.346.000	-
	<b>Jumlah</b>		<b>6.917.804.387</b>	<b>6.355.329.251</b>	<b>97.311.345</b>	<b>6.452.640.596</b>	<b>465.163.791</b>
<b>B. Gedung dan Bangunan</b>							
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	9.577.103.194	1.970.887.421	96.754.062	2.067.641.483	7.509.461.711
2.	Bangunan Tempat Tinggal		1.134.400.000	143.672.000	11.344.000	155.016.000	979.384.000
	<b>Jumlah</b>		<b>10.711.503.194</b>	<b>2.114.559.421</b>	<b>108.098.062</b>	<b>2.222.657.483</b>	<b>8.488.845.711</b>
<b>C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Aset Tetap Lainnya</b>							
1.	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017	s.d31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1.	Alat Kantor		104.582.000	104.582.000	-	104.582.000	-
2.	Alat Rumah Tangga		101.175.000	101.175.000	-	101.175.000	-
3.	Alat Studio		36.000	36.000	-	36.000	-
4.	Alat Komunikasi		3.371.000	3.371.000	-	3.371.000	-
5.	Peralatan Komputer		282.000	282.000	-	282.000	-
6.	Peralatan Olah Raga		160.000	160.000	-	160.000	-
7.	Bangunan Gedung Tempat Kerja		2.500.000	659.629	51.121	710.750	1.789.250
	Jumlah		212.106.000	210.265.629	51.121	210.316.750	1.789.250
	<b>TOTAL</b>		<b>27.091.913.581</b>	<b>8.680.154.301</b>	<b>205.460.528</b>	<b>8.885.614.829</b>	<b>18.206.298.752</b>

## *B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG*

**Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
NIHIL							
<b>Jumlah :</b>			-	-	-	-	

*C. INFORMASI PENDAPATAN  
DAN BELANJA SECARA  
AKRUAL*

*D. TELAAH LAPORAN  
KEUANGAN*